

SIKAP PARLEMEN TERHADAP RUU PERFILMAN

Oleh Angelina Sondakh

Anggota DPR-RI Komisi X Fraksi Partai Demokrat

PENDAHULUAN

Era 2000-an adalah era kebangkitan dunia perfilman Indonesia. Bioskop-bioskop di kota besar yang ada, penuh sesak di kunjungi para penonton. Dan di era itupula berlahiran para sineas-sineas muda berbakat. Dari tangan mereka itu film-film besar dan digemari lahir. Film *Ada Apa Dengan Cinta*, *Jomblo*, *Lentera Merah*, *Catatan Akhir Sekolah* dan *Brownies* menjadi salah satu film yang banyak dikunjungi penonton bioskop. Para sutradara muda seperti Nia Dinata, Riri Riza, Hanung Bramantyo dan lain-lain itu mampu mematahkan kelesuan film Indonesia selama 12 tahun lebih yang sepi pengunjung. Atau dari sisi pengunjung yang menonton film-film impor, film Indonesia sangat jauh tertinggal. Sekian belas tahun film Indonesia menjadi tamu dinegeri sendiri alias takluk pada film-film Hollywood dan Asia lainnya.

Karena itu kita harus memberi penghargaan yang setinggi-tingginya pada karya anak negeri sendiri terhadap kemajuan perfilman Indonesia saat ini. Mereka tidak hanya mampu membuat karya-karya yang disukai penonton. Namun karya-karya mereka juga mampu tampil secara sejajar dengan film-film negara lain dipentas Internasional. Film *Berbagi Suami* karya Nia Dinata misalnya dikabarkan masuk nominasi seleksi dalam mewakili Indonesia diajang penghargaan Oscar ke- 79 tahun di Amerika nanti. Sebuah prestasi yang sangat luar biasa dalam membawa nama bangsa di mata dunia internasional. Mereka adalah pahlawan-pahlawan negara yang menyumbangkan yang terbaik, seperti sumbangan medali emas yang di sumbangkan para atlet kita yang tampil di Asian Games di Doha, Qatar sekarang.

Riri Riza, Hanung Bramantyo, Nia Dinata dan lain- lain adalah sineas-sineas muda kreatif dan cerdas yang kita miliki sekarang. Mereka ini adalah figur-figur muda yang tengah melanjutkan generasi para sineas-sineas senior mereka yang berkarya melalui film. Memang dari sisi sejarah film itu sudah mulai ada sejak tahun 1926. Hueveldop dan Kruger warga berkebangsaan Belanda dicatat sebagai perintis awal film di Indonesia. Namun baru benar-benar film Indonesia disebut masuk dalam lapangan kebudayaan kira-

kira setelah itu. Mereka yang punya andil dalam permodalan dunia perfilman datang dari pengusaha Cina. Para pengusaha itu melihat film sebagai lapangan bisnis yang menggiurkan dalam memperoleh uang pada masyarakat yang saat itu haus hiburan. Atau hiburan pada saat itu sangat prospektif untuk dipasarkan pada masyarakat yang sedang membangun. Maklum pembangunan fisik saat itu bertumpu di kota. Dan masyarakat desa secara besar-besaran migrasi mencari kerja di kota. Di saat yang sama kebutuhan akan hiburan pada masyarakat urban juga semakin tinggi. Para pengusaha Cina mencium gejala ini sebagai peluang bisnis paling potensial bagi bisnis film itu sendiri.¹

Terlepas dari motif bisnis film yang ada. Satu yang perlu ditelusuri dari film-film pada awal-awal yaitu motivasi dari para tokoh dalam membuat film itu yang harus diketahui. Usmar Ismail seorang sineas pertama Indonesia membuat film dengan maksud menggunakan film sebagai media artistik baru untuk mengekspresikan kehidupan Indonesia kontemporer. Dimana film yang mencerminkan masyarakat Indonesia harus diangkat agar menjadi tontonan masyarakat pada zaman itu. Dan film barat tidak perlu karena belum pas dengan kultur masyarakat kita saat itu. Ide Usmar Ismail itu banyak mendapat dukungan dari para cendekiawan dan kaum muda. Sayangnya sekali film bagus itu hanya ditonton oleh segelintir kaum urban. Akibatnya para produser perfilman tidak bertahan lama alias bangkrut. Berbeda dengan generasi pertama yang membuat film berdasarkan motivasi bisnis. Film melodrama yang berbau percintaan dan horor justru laku keras di pasaran.

Kenyataan perfilman yang disukai dan tidak mendapat tempat dimata penonton itu di analisis karena masyarakat saat itu yang berbeda-beda. Pola pertama berkarakter perkotaan atau urban yang belum tuntas. Masyarakat itu punya selera nonton film-film percintaan dan horor. Sementara karakter masyarakat urban yang rasional masih sangat sedikit pada saat itu. Masyarakat ini suka pada film-film dengan tema-tema idealis seperti cerita tentang *Nyai Dasima* dan *Lutung Kasarung*. Tema - tema film legenda lama dan diceritakan secara populer itu ternyata hanya sedikit ditonton oleh kaum urban.

FILM DAN BUDAYA BANGSA

Di era industri dan informasi perfilman yang semakin kompetitif sekarang perdebatan tentang tema-tema film juga sering menjadi bahan pembicaraan serius. Setidaknya ada dua kutub pembicaraan yang mengemuka yang bisa kita catat. Pertama film yang

¹ Lihat Umar Kayam, *Budaya Massa Indonesia*, 1997

mendidik dan film yang merusak moral bangsa. Bagi sebagian kalangan, tema-tema vulgar yang diperankan oleh siswi-siswi yang bergandengan dengan om-om secara bebas di *mall-mall* dengan menggunakan seragam sekolah SMA tidak patut dilakukan alias patut dihentikan peredarannya. Mereka melihat film itu dapat meracuni generasi lain. Atau budaya perkotaan siswi-siswi perkotaan itu akan menjalar ke daerah lain yang masih hidup dengan tradisi yang kuat. Dan juga protes pada sinetron siswa SD dan SMP yang membawa mobil sendiri ke sekolah. Tayangan itu tidak mencerminkan realitas yang dirasakan masyarakat sekarang. Bagaimana mungkin, banyak anak-anak yang tidak bisa sekolah dan tidak mampu bayar uang sekolah. Atau banyak orang tua pusing tak bisa membiayai sekolah anaknya secara baik. Namun ada realitas lain yang ditemuinya justru hidup berlimpah harta. Ini sebuah tragedi dari bangsa yang hidup dalam *gap* yang begitu dalam.

Namun sisi lain juga punya alasan yang kuat dalam membuat film atau sinetron yang ada. Ini ruang kreatifitas para sutradara yang kalau dilarang merupakan sebuah pemasungan atau pembatasan kreatifitas bagi para pembuat film itu sendiri. Era reformasi merupakan era kebebasan yang bukan saja hak mahasiswa, politisi dan yang lainnya. Namun bagi para pekerja seni, film dan lain-lain era ini merupakan zaman baru bagi kebangkitan para pekerja film khususnya dalam melahirkan karya-karya terbaik mereka.

Dua kutub kepentingan bangsa dan kreatifitas para pekerja seni (film, sinetron dan lain-lain) itu yang kerap menjadi polemik yang harus diselesaikan secara bersama-sama ; kreatifitas tetap jalan dan kepentingan bangsa juga harus mendapat perhatian serius. Atau film bisa menjadi alat membangun kohesi bangsa dan negara, sekaligus menghargai kreatifitas para pekerja film itu sendiri. Model itu yang perlu dirumuskan bangsa ini dalam menghadapi sekaligus mengantisipasi globalisasi industri film itu mempengaruhi budaya bangsa kita. Model Orde Baru jelas sangat terlalu mengekang dalam mempengaruhi masyarakat melalui film yang dibuat. Media film dan sinetron pada zaman ini sangat hegemonik atau tunduk pada pemerintah. Film yang lahir memang sangat dekat dengan kehidupan kampung atau pedesaan. Atau cocok dengan corak masyarakat kita yang agraris. Namun kontrol yang dipakai terlalu ketat sehingga film yang lahir tak lebih adalah produk-produk pemerintah yang muaranya harus ikut dalam frame dan ideologi tertentu. Atau Orde Baru punya aturan baku dalam menyeleksi film-film yang bisa lolos atau diputar. Yang tidak lolos sangat banyak.

Kenyataan penyensoran itu apakah harus kita hilangkan, atau tidak. Sebuah pertanyaan yang harus kita jawab. Namun mengacu pada beberapa negara dengan standar dan

kualifikasi sensor yang dipakai, kiranya kita juga bisa mempertimbangkan apa yang sudah mereka lakukan sebagai referensi. Amerika dan Australia punya aturan tentang film yang layak ditayangkan atau tidak. Atau film itu layak diedarkan atau ditolak harus memenuhi klasifikasi dan serta umur penonton. Misalnya aturan pemutaran film yang akan ditayangkan di televisi dan bioskop harus dibedakan. Penonton film bioskop di klasifikasi sebagai penonton kritis. Sementara penonton televisi sangat rawan. Karena kategori penonton ini luas dan dapat di akses secara luas oleh seluruh lapisan masyarakat yang ada. Tahun 1968 Amerika Serikat memberlakukan system MPAA (*Motion Picture Association Of Amerika*) *Rating System* dalam rangka pengklafikasian film sebelum di edarkan seperti dibawah ini ;

1. G untuk segala usia
2. PG untuk dibawah pengawasan orang tua (beberapa elemen dalam film dinilai tak layak bagi anak-anak)
3. PG-13 untuk dibawah pengawasan ketat orang tua (dilarang keras bagi anak-anak dibawah usia 13 tahun)
4. R untuk dibawah pengawasan orang tua/ orang dewasa bagi yang belum berumur 17 tahun
5. NC-17 untuk dilarang keras bagi penonton dibawah usia 17 tahun.

Sementara Australia punya (OFLC) *Australian Office of Film and Literature Classification*. Lembaga ini memberlakukan syarat-syarat sebagai berikut ;

1. G sesuai untuk semua penonton, meski demikian tanda ini tidak berarti sesuai untuk anak-anak (dapat dikonsumsi anak-anak)
2. PG (*Parental Guardian*). Dibawah bimbingan orang tua di rekomendasikan untuk anak-anak dibawah umur 15 tahun
3. M untuk dewasa, direkomendasikan untuk audience yang berumur 15 tahun atau lebih.
4. MA (*Mature Accompanied*). Anak-anak dibawah umur 15 tahun tidak boleh menonton film kategori atau meminjam video tanpa di dampingi oleh orang tua atau orang lebih dewasa.
5. R (*Restricted*). Kategori ini hanya dibatasi untuk orang yang berusia dibawah 18 tahun termasuk meminjam kasetnya.
6. X Restricted. Rating ini merujuk psds film-film yang secara eksplisit menunjukkan seksualitas yang terbatas hanya bisa ditonton oleh orang berumur 18 tahun dan lebih.

Dari referensi negara-negara maju yang terkenal liberal dibanding negara kita dalam banyak hal. Namun ternyata aturan perfilman mereka begitu sangat luar biasa. Sensor yang sangat memproteksi anak-anak dari tayangan yang tidak mendidik. Hal itu sangat kontras di negara kita yang dalam banyak kasus anak-anak kita bisa menonton tayangan orang dewasa.

FILM INDONESIA YANG BERVISI

Film Indonesia yang mulai bangkit dalam masa-masa sekarang harusnya dijadikan tonggak penting bagi para sineas-sineas berkontribusi pada bangsa dan negara. Reformasi yang belum final memperbaiki nasib rakyat adalah realitas yang bisa di gali oleh para sineas-sineas yang ada. Kekerasan pada perempuan, nasib TKI, kekerasan atas nama agama, diskriminasi pelayanan kesehatan oleh rumah sakit pada kaum miskin dll adalah fenomena sosial yang dapat dijadikan tema perfilman nasional. Tema -tema itu dapat menjadi tontonan bermutu dan bernilai mendidik masyarakat kita. Dan semestinya kita menghindari tema-tema *show* kemewahan dan kekerasan yang kita umbar pada masyarakat kita yang sedang sakit. Itu artinya film harus ikut memecahkan masalah bangsa, bukan sebaliknya menambah beban masyarakat. Tayangan metropolis (hidup kaum remaja, pergaulan hingga kemesraan serta kekerasan) hanya menambah beban masyarakat penonton. Saksikan misalnya kasus korban anak-anak akibat tontonan acara *SMACK DOWN* dan korban film lainnya.

Usmar Ismail tokoh perfilman Indonesia adalah salah satu nama yang punya visi besar dalam menciptakan karya-karyanya dengan orientasi mendidik dan mencerahkan masyarakat dengan gagasan film yang ia buat. Dan belakangan tipe ini bisa dilihat dari karya-karya yang diciptakan generasi sesudahnya. Mereka diantaranya Teguh Karya, Chairul Umam, Arifin C. Noor dan Garin Nugroho. Mereka misalnya yang berkarya di era rezim otoriter mampu menyesuaikan karyanya dengan kebijakan saat itu. Tuntunan moral dan ajakan berbuat baik yang bersifat normatif menjadi ciri khas film yang dilahirkan di zaman itu. Film *Cinta Sepotong Roti* misalnya yang menampilkan pemeran sebagai penutur moral. Namun film itu diakui tanpa perspektif. Ini barangkali sebuah kehati-hatian dalam membuat karya film pada era itu.

Kembali pada film bervisi. Satu lagi film yang mendapat sambutan hangat dari masyarakat yang patut kita apreseasi. Film *Denias Senandung Di Atas Awan* karya suami istri Arie Sihale dan Nia Zulkarnaen sangat monumental dari sisi alur cerita yang di

sampaikan. Pesan pendidikan dan perjuangan seorang anak di pedalaman Papua mewakili potret sosial sebuah masyarakat Indonesia yang belum merata pendidikannya sangat menyentuh dan pas dengan realitas yang ada. Film ini menjadi masukan berharga serta kritik membangun yang disampaikan melalui film. Karya ini jelas sangat mendidik masyarakat yang ada dengan potret, isi cerita dan pemandangan pedalaman Papua yang masih tertutup tanpa ada sarana dan prasarana yang ada. Mereka harus berjalan ber-mil-mil dan sehari-hari untuk menggapai harapan dan hari esok yang lebih baik.

PENUTUP

Film bermutu dan penuh kreasi dari sineas-sineas harus di dorong secara bersama-sama dalam rangka ikut mendidik dan mencerdaskan bangsa sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945. Dan dari sejarah yang ada sesungguhnya peran film sangat besar membantu menyelesaikan persoalan bangsa yang ada sekarang. Hal itu sesuai dengan sejarah perfilman itu sendiri, yang berperan besar dalam merebut kemerdekaan dari tangan penjajah Belanda dan Jepang.

Dan dalam perjalanan sejarah, perjuangan itu sekarang adalah mencerdaskan bangsa serta ikut mendidik masyarakat Indonesia dalam mempertahankan eksistensinya dari serangan budaya globalisasi film-film impor yang ada. Karena itu hal yang paling penting dan urgen yaitu membuat payung hukum perfilman secepatnya. Payung hukum itu berfungsi mengganti hukum yang lama. Yang lama misalnya tertuang dalam UU No. 8 Tahun 1992. UU itu baru ada sejak regulasi perfilman pada zaman pemerintahan Belanda di Indonesia. Artinya dalam kurun waktu yang panjang perfilman masih belum otonom. Di tahun 1960 perfilman diatur dalam ketetapan MPRS No . II/ MPRS/1960. Dizaman ini film berada dibawah koordinasi menteri agama. Tahun 1964 perfilman diubah dibawah menteri penerangan.²

Perubahan- perubahan dengan membawa semangat yang juga berubah-ubah. Jika pada awalnya perfilman sebagai alat propaganda untuk kemerdekaan. Maka pada tahun 1960 perfilman disebutkan bukan semata-mata alat perdagangan tapi juga alat pendidikan dan penerangan. Karena itu payung hukum yang diusulkan sebaiknya berbentuk undang-undang secara otonom. Atau RUU yang ada harus mempertimbangkan aspek-aspek moral, budaya, gender , pendidikan, agama, kekayaan lokal dan demokratisasi yang ada sebagai media kajian dan eksplorasi para sineas. Dan diharapkan pula dari perfilman itu

² *Lihat Draft Akademis RUU Perfilman, 2006*

akan hadir tontonan yang tidak saja sebagai media hiburan, tapi juga sebagai media edukasi dalam membangun budaya sebuah bangsa itu menjadi mandiri, otonom dan kuat menghadapi tantangan budaya negatif asing.

Karena itu rancangan undang-undang perfilman itu diperlukan untuk memperkuat struktur dan bangunan kekayaan budaya masyarakat Indonesia yang begitu heterogen. Dan pikiran-pikiran para sineas, dan pekerja seni lain yang sangat dekat dengan dunia perfilman yang sangat paham terhadap apa yang dibutuhkan bangsa ini pada peran para sineas perfilman. Tentu pikiran-pikiran itu akan menjadi bahan paling berharga bagi parlemen untuk bahan diskusi bersama dalam merumuskan sebuah produk politik. Produk itu harus ikut pula memikirkan nasib para pekerja di industri film serta monopoli industri perfilman oleh bioskop-bioskop besar. Sementara nasib bioskop-bioskop kecil dari waktu ke waktu terus tenggelam atau bangkrut.

Karena itu bangkitnya dunia perfilman yang kita nikmati sekarang harus dibarengi dengan kebangkitan lain. Misalnya perhatian dunia perfilman pada artis, crew dan lain-lain yang menjadi tenaga-tenaga profesional harus juga mendapat perhatian yang sama dari pemerintah. Tenaga-tenaga kerja dibidang perfilman maupun masalah pembajakan yang merugikan insan perfilman dapat bersinergi dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang ada. Masalah tenaga kerja seperti crew, artis dan lain-lain yang berurusan dengan profesionalitas dan kesejahteraan insan perfilman sangat tepat melakukan kerjasama dengan Depnaker. Sementara dalam hal mengatasi pembajakan yang merugikan karya-karya perfilman sebaiknya diatasi dengan bekerjasama secara intens dengan kepolisian.

Karena film bermutu dan sangat disukai oleh khalayak sangat terkait dengan banyak faktor. Faktor-faktor dominan dalam menumbuhkan industri perfilman ditengah air harus memperhatikan aspek-aspek penting diatas, agar peran perfilman sebagai media pencerdasan bangsa dan membangun budaya bangsa betul-betul bisa dirasakan manfaatnya oleh bangsa ini nantinya. Jadi bisnis dan kepentingan bangsa yang diemban dunia perfilman harus sejalan, dan tidak saling menafikan satu dan lainnya.